

Merawat Hutan

Dimuat Harian Bernas, Senin, 28 September 2015

Oleh: Heri Priyatmoko SS MA

Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma

Kali ini, bukan pasar tradisional dan pemukiman kumuh yang menjadi obyek *blusukan* Presiden Joko Widodo. Rabu (23/9/2015), ia bertolak ke Kalimantan Selatan (Kalsel) hendak meninjau sejumlah lokasi kebakaran hutan, lahan, dan daerah yang diselimuti kabut asap.

Ke Kalsel, mantan Walikota Solo ini didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Rombongan memancarkan niat melihat lokasi titik api di Desa Guntung Damar, Banjarbaru. Di lokasi ini, presiden menyorongkan pengarahan kepada sekelompok prajurit dan petugas pemadam kebakaran.

Sebelumnya, presiden bertubuh jangkung yang digambarkan seperti tokoh Petruk ini menjejalkan kaki di hutan yang terbakar di Dusun Pulau Geronggang, Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemarin, bencana asap di enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan memang sudah masuk level parah. Melihat kondisi lapangan, alumnus Jurusan Kehutanan UGM tersebut geram.

Lalu, diperintahkannya polisi untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan lahan, bila perlu dipidanakan supaya kapok. Akibat ulah tangan jahil itu, sejumlah bandara ditutup lantaran jarak pandang hanya 300 meter. Data satelit juga menunjukkan 80 persen kawasan Sumatera “panen asap”. Para penjahat hutan ini tak memahami bahwa perbuatan tersebut menyebabkan bencana alam mengintai. Alam mengamuk terhadap manusia gara-gara diperlakukan secara sewenang-wenang dan eksploitasi tanpa diikuti pemulihan.

Tempo doeloe, sekejam-kejamnya pemerintah kolonial Belanda menindas kaum pribumi dan menyedot sumber daya alam di *Nuswantara*, namun tetap peduli terhadap politik hutan. Kebijakan tersebut merupakan bukti kesadaran ekologis para toewan kulit putih untuk mencegah terjadinya bencana alam.

Contohnya, gunung Merapi yang acap memuntahkan lahar dikukuhkan oleh pemerintah kolonial sebagai hutan lindung tahun 1912. Mereka paham bahwa gunung legendaris tersebut sewaktu-waktu bisa mengeluarkan *wedus gembel*. Lahar ini bukan hanya meluluhlantakkan pedesaan di lereng Merapi, tapi juga melibas masyarakat yang bermukim di Yogyakarta, Magelang, dan Boyolali.

Belanda lalu mengeluarkan *Gouvernements Besluit* tanggal 4 Mei 1931 no. 4197/B guna mengatur areal hutan seluas 6.472,1 ha ini menjadi hutan lindung. Siapapun dilarang menebang dan meladang di dalam hutan. Misi mulia yang terus didengungkan, yaitu memanfaatkan hutan sebagai sabuk penahan erosi, banjir, penyedia air tanah, dan memelihara kesuburan tanah. Dalam perkembangan lebih lanjut, hutan Merapi digarap sebagai cagar budaya dan taman wisata. Gunung merupakan laboratorium genetik flora-fauna yang berfaedah bagi objek riset keilmuan dan kebudayaan.

Sedikit mundur ke belakang. Periode 1874 pejabat Dinas Kehutanan Belanda mengeluarkan ketentuan perihal rehabilitasi dan reboisasi kehutanan dengan sistem tumpangsari. Hasil studi historis Desak Made Oka (2004) tentang hutan jati Madiun, meriwayatkan bahwa sistem yang digagas Buurman ini telah lulus uji coba dan membawa hasil yang menggembirakan di Tegal-Pekalongan. Sistem tersebut resmi dipakai pedoman merehabilitasi dan mereboisasi hutan usai penebangan total. Pemerintah mencari *pesanggem*,

yakni petani yang ditugasi membersihkan lapangan tebang dan menanam biji jati setiap bulan Agustus dan Desember. Keuntungan yang didapat *pesanggem* dari politik hutan ini, antara lain bisa memanen palawija, padi gogo, jagung, tembakau, ketela, dan lainnya.

Penduduk yang tak tersentuh kekuatan kolonial, sebetulnya telah menjalankan “politik hutan” yang dibungkus folklor. Misalnya, masyarakat di lereng hutan Lawu rutin menggelar ritual tradisional. Dalam riset saya tahun 2006, terkuak bahwa leluhur mereka bernama Kyai Menggung dan Nyi Roso Putih mewanti-wanti warga setempat jangan sampai membuka lahan bercocok tanam padi. Bila dilanggar, bakal terkena musibah. Mereka dianjurkan menanam bunga dan jagung guna mencukupi kebutuhan. Pesan ini merupakan sebentuk *local genius*. Jika penduduk yang tinggal di daerah miring ini menanam padi, maka akan dilabrak bencana longsor.

Hati siapa yang tega membiarkan hutan Indonesia dirusak dan masyarakat menuai bencana. Maka dari itu, Presiden Jokowi harus menghukum seberat mungkin para pelaku supaya menimbulkan efek jera. Di samping itu, kampanye merawat hutan kudu makin dibumikan dengan kembali mengakrabkan masyarakat dengan folklor yang menyimpan kearifan lingkungan.